

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Cet 5*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hazewinkel-Suringa, 1973, *Inleiding Tot De Studie van het Natherlands Strafrecht*, Grooningen: Bewekert door Mr. J. Remmelink Zesde druk H. D. Tjeenk Willink BV.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- J. Kenedi, 2017, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- J. E. Jonkers, 1946, *Handbock van het Ned. Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill.
- Marlina, 2011, *Hukum Panitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naskah Akademik RUU KUHP*, 2015, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, 2015, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perpektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurlia Nurdin dan Astika Ummy Athahirah, 2022, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Banyumas: Sketsa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philips Aston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor.



Pendidikan Hak Asasi Manusia, Surakarta: Indotama Solo.

ikum dan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

rief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.

Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian*

Cybercrime di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Agus Salim, Perlindungan Ideologi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1, Tahun 2021.
- Dian Rahadian, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik, *Neliti*, 2022.
- Ida Bagus Gede Widia Utama, S.H., M.H., "Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 1, Tahun 2022.
- I Made Dharmawan, Delik terhadap Ideologi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2021.
- I Made Oka Suteja, Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara dalam KUHP dan RKUHP, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2021.
- Jeckson Manurip, Roy Ronny Lembong, Victor D. Kasenda, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam Pasal 107a – 107b Kitab Undangundang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 11, 2021.
- Manapa Mavrick, Fonny Tawas, Hironimus Taroreh, Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Pasal 107a – 107f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen* Vol. 9, No. 4, 2020.
- Muhammad Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi, *Jurnal Pandecta*. Volume 11. Nomor 2. Desember 2016.
- Muhammad Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi. *Jurnal Pandecta*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
- Shldarta, 2016. Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara, <https://business-law.binus.ac.id> diakses Tanggal 28 November 2023.
- Yaris Adhial Fajrin dkk, Reformulasi Delik Ideologi dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 3, Desember 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Jntuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran  Marxisme-Leninisme



Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Nomor 11/PPNS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan

Subversif

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Optimized using
trial version
www.balesio.com